

Model Penguatan Lembaga Petani Sebagai *Prime Mover* Nilai Tambah Produk Pertanian

Bisri Djalil¹

Email: bisri_jalilgrati@yahoo.co.id

ABSTRACT

In this study, the author wanted to see how the role of agriculture in development generally, As well as the farmer organizations model which can be the prime mover value-added of agricultural products. Agricultural organizations have gotten attention from academics and government since a long time ago, but the existence of the organizations have not been able to act as they should. this proved from the development of the agricultural sector has not been optimal yet, and in particular, the farmers in East Java are still constrained by the sale value of rice that low. The model of organizations strengthening farmers can be the prime mover value-added agricultural products, if they fulfill the following criteria: the farmer organizations should be able to access the products of financial institutions, synergy with the local program, as forum for promotion and development of farmers, access of experts, Information providers, and as media of management services and marketing of agricultural products.

Keywords: Agriculture, Farmers, Farmer Organizations, Value-Added of Agricultural Products

A. Pendahuluan

Sektor pertanian memiliki peran yang penting dalam perekonomian terlebih untuk negara agraris seperti Indonesia. Sehingga dalam GBHN menetapkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan Nasional, karena begitu sentralnya peran sektor ini terhadap pembangunan perekonomian nasional, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten atau kota akan memiliki *frame work* masing-masing dalam membangun sektor pertanian. Bahkan di Indonesia bisa dikatakan setiap pergantian pemerintah akan mengalami pergantian strategi dalam pembangunan pertanian. Bila kita melihat sejarah, program pembangunan sektor perpertanian sudah dimulai semenjak negeri ini merdeka, masa pemerintahan Orde lama, Orde baru sampai pasca Reformasi, yang terakhir adalah pemerintahan SBY-JK, tepatnya tahun 2005 SBY mengumumkan Revitalisasi Pertanian. Dalam program tersebut

¹ Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri

telah ditetapkan arah masa depan sektor pertanian, perikanan dan peternakan, kurang lebih revitalisasi pertanian bertujuan untuk mensejahterakan petani dan sektor pertanian diarahkan untuk berkontribusi lebih dalam pembangunan perekonomian. Hal yang disayangkan adalah program Revitalisasi pertanian tersebut tidak di"payungi" hukum seperti, Peraturan Presiden atau perundang-undangan, sehingga tidak ada jaminan program-program yang baik tersebut akan dijalankan pada masa pemerintahan selanjutnya.

Satu hal yang harus kita pahami bersama, bahwa sektor pertanian tidak hanya sebagai penghasil out put komoditas, tapi peran dan fungsi lebih luas dari hal tersebut. Beberapa peran penting sektor pertanian secara umum, antara lain²: *Pertama*, penghasil pangan dan bahan baku. Sektor pertanian sangat menentukan dalam ketahanan pangan nasional sekaligus menentukan ketahanan bangsa. Penduduk Indonesia tahun 2025 akan mencapai 300 juta lebih, ketahanan nasional akan terancam bila pasokan pangan kita sangat tergantung dari impor. *Kedua*, pembangunan daerah dan perdesaan. Pembangunan nasional akan timpang kalau daerah/perdesaan tidak dibangun, urbanisasi tidak bisa ditekan dan pada akhirnya senjang antar desa dan kota akan semakin melebar. Lebih 83% kabupaten atau kota di Indonesia ekonominya berbasis kepada pertanian. *Ketiga*, peyangga dalam masa krisis. Sektor pertanian yang berbasis sumber daya lokal terbukti sangat handal dalam masa krisis ekonomi, bahkan mampu menampung 5 juta tenaga kerja limphan dari sektor industri dan jasa yang terkena krisis. Kasus Bom Bali yang melumpuhkan pariwisata di Bali, terselamatkan oleh sektor pertanian. *Keempat*, penghubung sosial ekonomi antar masyarakat dari berbagai pulau dan daerah sebagai perekat persatuan bangsa. Masing-masing pulau/daerah memiliki keunggulan komparatif yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan keunggulan masing-masing. Perdagangan (trade) antar pulau ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi dengan melakukan spesialisasi masing-masing daerah. Saling ketergantungan antara daerah menjadi jaminan pengembangan ekonomi daerah dan mempererat persatuan antar daerah.

Kelima, kelestarian sumber daya lingkungan. Kegiatan pertanian berperan dalam peyangga, penyedia air, udara bersih dan keindahan. Pada hakekatnya pertanian selalu menyatu dengan alam. Membangun pertanian yang berkelanjutan (*sustainable*) berarti juga memelihara sumberdaya lingkungan. Agrowisata merupakan contoh yang ideal dalam multifungsi pertanian. *Keenam*, sosial budaya masyarakat. Usaha pertanian berkaitan erat dengan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat. Sistem sosial yang terbangun dalam

² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2005: II, 1-3

masyarakat pertanian telah berperan dalam membangun ketahanan pangan dan ketahanan sosial, seperti lumbung pangan, sistem arisan dan lainnya. *Ketujuh*, kesempatan kerja, PDB dan devisa. Lebih dari 25,5 juta keluarga atau 100 juta lebih penduduk Indonesia hidupnya tergantung pertanian. Sektor pertanian menyerap 46,3% tenaga kerja dari total angkatan kerja, menyumbang 6,9% dari total ekspor non migas, dan memberikan kontribusi sebesar 15% PDB Nasional.

Peran serta multifungsi sektor pertanian di atas menggambarkan apabila sektor pertanian mendapat perhatian yang lebih, maka dapat dipastikan tidak hanya *stakeholder* pertanian saja yang mendapatkan manfaatnya, namun juga akan berpengaruh positif secara signifikan. Mengingat efek *multiplier* dari pertanian sangat luas, sampai pada sektor industri dan sektor keuangan, dan pada akhirnya pada perekonomian nasional. Kendati secara teori maupun secara praktis yang tertuang dalam program pemerintah, namun pembangunan sektor pertanian masih mengalami banyak permasalahan dan kendala, sehingga pembangunan sektor pertanian belum mencapai titik optimal atau bahkan cenderung menurun.

Terkait dengan permasalahan sektor pertanian, tentu sudah banyak kalangan yang sudah berhasil mengidentifikasi apa saja permasalahan yang dialami dan akan dihadapi oleh sektor pertanian, baik dari kalangan pemerintahan, akademisi atau pemerhati pertanian. Namun yang harus kita pahami bersama adalah, bahwa permasalahan dan solusi dari permasalahan tersebut bersifat dinamis, sehingga pengakajian terhadap permasalahan dan solusi alternatif harus selalu diupayakan seiring dengan perubahan waktu.

Dalam pemaparan permasalahan pertanian nasional, penulis akan memaparkan permasalahan petani di Jawa Timur, sebagai gambaran secara umum permasalahan pertanian nasional. Dari hasil penelitian World Bank pada tahun 2011, menunjukkan beberapa permasalahan petani Jawa Timur sebagai berikut,

Tabel 1.1 Permasalahan Petani Jawa Timur

No	Permasalahan Petani	Persentase
1	Harga Jual Gabah Rendah	90%
2	Kesulitan Memenuhi Standar Kualitas	3%
3	Kesulitan Produksi	3%
4	Kesulitan Transportasi	2%
5	Kesulitan Lainnya	2%

Sumber: World Bank, 2011

Dari tabel 1.1 di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh petani Jawa Timur, yakni harga jual gabah rendah dengan bobot 90%, kesulitan memenuhi standar kualitas dengan bobot 3%, kesulitan produksi dengan bobot 3 %, serta kesulitan transportasi dan kesulitan lainnya masing-masing dengan bobot 2%. Dan dirasa hal ini pula yang menyebabkan pembangunan pertanian nasional mengalami banyak kendala.

Dari hasil penelitian World Bank pada tahun 2011, menyatakan bahwa salah satu permasalahan terbesar petani Jawa Timur adalah nilai jual gabah yang rendah, seringkali saat musim panen raya harga jual gabah rendah, akibatnya para petani sulit untuk meningkatkan nilai tambah petani. Hal ini disebabkan karena petani gabah berada pada pasar monopsoni, dan sulitnya petani untuk mengakses pasar. Bahkan tidak sedikit pula petani yang terpaksa menggunakan sistem *ijon* (pembelian sebelum panen) yang membuat petani mengalami kerugian, karena hampir separo hasil pertanian menjadi milik pedagang.

Selain itu tidak jarang pula petani yang diawal sudah meminjam modal kepada pedagang dengan konsekuensi bahwa hasil pertanian mereka akan dibeli oleh pedagang di mana petani meminjam modal tersebut, dan akibatnya nilai tawar mereka rendah. Kondisi yang demikian memberikan dampak negatif kepada petani, yakni petani mengalami disintensif untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. Hal ini dapat dilihat dari indeks nilai tukar petani (NTP) berikut,

Tabel 1.2 NTP Nasional

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NTP	100,16	99,86	101,77	104,58	105,24	104,92	102,03

Sumber: BPS, 2016

Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat NTP berada pada level kurang lebih 100, dan belum menunjukkan penambahan yang berarti. Sehingga wajar jika terjadi ketimpangan dan kemiskinan di sektor pertanian, akibatnya sektor pertanian lambat laun akan ditinggalkan oleh pelakunya (petani beralih profesi). Melihat kondisi sektor pertanian yang dialami oleh petani, maka harus selalu diupayakan dan dikembangkan usaha-usaha untuk menyelesaikan permasalahan pertanian.

Usaha memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat secara generik, memang penting, tetapi yang jauh lebih penting, adalah pemahaman bersama secara jernih terhadap karakteristik permasalahan ketidakberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Sebab dengan pemahaman yang jernih

mengenai ini, akan lebih produktif dalam memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik permasalahan lokal. Berikut adalah salah satu contoh problem spesifik yang dihadapi masyarakat tunadaya dalam bidang akses faktor produksi modal.³

Oleh karena itu dalam kajian ini, akan dikaji secara spesifik terkait dengan penguatan kelembagaan petani mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam hal ini adalah petani padi, sebagai salah satu komoditas pangan nasional. Sehingga dalam kajian ini akan dijelaskan bagaimana konsep kelembagaan secara umum, sampai pada kelembagaan petani yang dapat menjadi *prime mover* dalam meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian, sehingga permasalahan petani akan rendahnya nilai jual padi dapat teratasi.

B. Pembahasan

1. Penguatan Kelembagaan

Menurut UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Pertanian didefinisikan sebagai seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha petani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Perpetanian yang dimaksud mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Studi ini dilakukan di setiap kegiatan pertanian (usaha hulu sampai dengan hilir/sistem agribisnis) khususnya pada tanaman padi.

Sedangkan pengertian kelembagaan dikelompokkan ke dalam dua pengertian, yaitu institut dan institusi. Institut menunjuk pada kelembagaan formal, misalnya organisasi, badan, dan yayasan mulai dari tingkat keluarga, rukun keluarga, desa sampai pusat, sedangkan institusi merupakan suatu kumpulan norma-norma atau nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya⁴. Sehingga pengertian kelembagaan petani yang dimaksud adalah kelembagaan formal (organisasi) dan institusi/ norma-norma yang berkaitan dengan petani.

³ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, Naskah No. 20, Juni-Juli 2000

⁴ Wariso, 1998 dalam; Sri Wahyuni. 2003, *Kinerja kelompok Petani Dalam Sistem Usaha Petani Padi dan Metode Pemberdayaannya*. Jurnal Litbang Perpetanian, 22(1). Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Perpetanian, Kementerian Perpetanian Republik Indonesia.

Mengingat petani yang memiliki posisi tawar yang rendah khususnya ketika pada pasar, maka peran kelembagaanlah yang dapat diandalkan untuk meningkatkan posisi tawar petani. Peran kelembagaan bisa dibidang variatif, kelembagaan sebagai salah satu faktor penggerak dalam sistem produksi sangat penting guna menunjang keberlanjutan pertanian. Kelembagaan dalam hal ini tidak saja menyangkut kelembagaan usaha petani, melainkan juga peranan kelembagaan-kelembagaan penunjang yang dapat mendukung pengembangan model penyuluhan terpadu. Disisi lain dalam pengembangan pertanian ketersediaan modal dalam jumlah cukup dan tepat waktu merupakan unsur strategis dan penting. Untuk itu pemerintah membantu dengan memberikan berbagai macam fasilitas permodalan seperti pemberian kredit melalui program KUR, KUT, KI, perbankan dan nonperbankan⁵.

Peran lembaga petani memerlukan penguatan kelembagaan baik kelembagaan petani, maupun kelembagaan usaha dengan pemerintah yang berfungsi sesuai dengan perannya masing-masing. Kelembagaan petani dibina dan dikembangkan berdasarkan kepentingan masyarakat dan harus tumbuh dan berkembang dari masyarakat itu sendiri.

2. *Ekisting* Kelembagaan Pertanian Pada Umumnya

Kelembagaan pertanian meliputi kelembagaan penyuluhan (BPP), kelompok petani, Gapoktan, Koperasi petani (Koptan), penangkar benih, pengusaha benih, institusi perbenihan lainnya, kios, KUD, pasar desa, pedagang, asosiasi pepetani, asosiasi industri olahan, asosiasi benih, P3A, UPJA dan lain-lain⁶. Kelembagaan pepetani pada tataran dunia akademis dan kebijakan pemerintah bukanlah hal baru, konsep dan penerapannya sudah lama, namun bisa dikatakan belum mencapai titik optimal, sehingga terkesan masih sebatas program formalitas dari pemerintah, atau sekedar memenuhi target dari program pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Selama ini kelembagaan pertanian lebih banyak digunakan untuk menjalankan program, namun sering mengalami kekeliruan dan ketidaktepatan. Contoh kecil adalah penggunaan kelompok petani dalam penyaluran pupuk bersubsidi sering kali disalahgunakan oleh pihak yang berkepentingan, atau penyaluran bantuan alat-alat pertanian yang kerap dijadikan sebagai ladang bisnis, di mana bantuan alat pertanian dari pemerintah untuk

⁵ Yunita, dkk. *Meningkatkan Penguatan Kelembagaan dan Permodalan Pepetani Lahan Lebak Sumatera Selatan*. Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal 2014, Palembang 26-27 September 2014.

⁶ Warsana, *Pemantapan Kelembagaan Pada Gapoktan*, [http://www.litbang.perpetanian.go.id/artikel/one/249/pdf/Pemantapan%20Kelembagaan%20Pada%20G](http://www.litbang.perpetanian.go.id/artikel/one/249/pdf/Pemantapan%20Kelembagaan%20Pada%20Gapoktan.pdf)apoktan.pdf. diakses tgl 20 Agustus 2016

petani dijual kepada pihak lain dengan harga yang murah. Sehingga bantuan tersebut tidak tepat sasaran.

Kelembagaan petani di daerah pedesaan, umumnya tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu⁷ : (1) kelompok petani pada umumnya dibentuk berdasarkan kepentingan teknis untuk memudahkan pengkoordinasian apabila ada kegiatan atau program pemerintah, sehingga lebih bersifat orientasi program, dan kurang menjamin kemandirian kelompok dan keberlanjutan kelompok, (2) partisipasi dan kekompakan anggota kelompok dalam kegiatan kelompok relatif rendah. ini tercermin dari tingkat kehadiran anggota dalam pertemuan kelompok rendah, (3) pengelolaan kegiatan produktif anggota kelompok bersifat individu. Kelompok sebagai forum kegiatan bersama belum mampu menjadi wadah pemersatu kegiatan anggota dan pengikat kebutuhan anggota secara bersama, sehingga kegiatan produktif individu lebih menonjol, (4) pembentukan dan pengembangan kelembagaan tidak menggunakan basis *social capital* setempat dengan prinsip keotonomian dan pemberdayaan, (5) pembentukan dan pengembangan kelembagaan berdasarkan konsep cetak biru (*blue print approach*) yang seragam. Introduksi kelembagaan dari luar kurang memperhatikan struktur dan jaringan kelembagaan lokal yang telah ada, serta kekhasan ekonomi, sosial, dan politik yang berjalan, (6) pembentukan dan pengembangan kelembagaan berdasarkan pendekatan yang *top down*, menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi masyarakat, (7) kelembagaan-kelembagaan yang dibangun terbatas hanya untuk memperkuat ikatan horizontal, bukan ikatan vertikal, dan (8) pengembangan kelembagaan selalu menggunakan jalur struktural, dan lemah dari pengembangan aspek kulturalnya.

Lemahnya kelembagaan dalam menjalankan fungsi dan perannya harus segera dicarikan formula yang tepat. Tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan tentunya tidak menghilangkan *local wisdom*, sehingga pengembangan dalam kelembagaan tidak berseberangan dengan adat yang sudah ada, namun dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh petani yakni rendahnya nilai jual produk pertanian.

⁷ Syahyuti, 2003; Purwanto, dkk, 2007, dalam; Parma, Putu Gede. *Pengembangan model penguatan lembaga pertanian sebagai prime mover pembangunan kawasan daerah penyangga pembangunan (dpp) destinasi wisata kintamani – bali*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 3, No. 1, April 2014, 384-385

3. Penguatan Lembaga Petani Sebagai *Prime Mover* Nilai Tambah Produk Pertanian

Lembaga petani akan mampu menjadi *prime mover* nilai tambah produk pertanian, tentu jika keberadaan lembaga tersebut mampu menempatkan posisinya yang semestinya. Artinya keberadaan kelembagaan petani tersebut harus dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat yang bersagkutan dan mempunyai capaian tujuan yang sama. Adapun lembaga petani yang dapat menjadi *prime mover* nilai tambah produk pertanian, setidaknya-tidaknya memenuhi kriteria berikut:

Pertama, lembaga petani harus mampu mengakses produk-produk lembaga keuangan. Salah satu permasalahan petani yang tidak asing lagi ditelingga adalah lemahnya akses petani terhadap lembaga keuangan, selain itu jika lembaga petani mampu mengakses lembaga keuangan untuk mendapatkan modal dengan anggungan yang ringan, akan berdampak pada ringannya biaya produksi pertanian, sehingga petani akan lebih banyak mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain nilai jual padi (produk pertanian) akan dapat diatasi.

Di Indonesia ada lebih 600 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi, dimana tujuan LKM adalah melayani kelompok atau masyarakat yang *unbankable*, namun akses LKM masih sangat minim, sehingga dengan adanya lembaga petani dapat menjadi perantara bagi petani yang akan meminjam modal dari LKM. Karena bisa jadi minimnya akses LKM terhadap petani bukan kesalahan LKM, namun petani sendiri yang tidak mampu atau tidak tahu akan manfaat dari keberadaan LKM. Manfaat lain yang didapat petani dengan memanfaatkan LKM adalah terbebasnya petani dari rentenir⁸.

Kedua, sinergitas dengan program daerah setempat. Pihak swasta dan pemerintah meskipun berbeda peran dan fungsi dalam hal pertanian, namun pada dasarnya keduanya tidak dapat berjalan sendiri-sendiri kedua saling terkait satu dengan yang lain. Sehingga lembaga petani diharapkan mampu mengakses program-program pemerintah terkait dengan pertanian, seperti misalnya mengakses bantuan bibit unggul, bantuan alat produksi pertanian, atau bahkan sinergitas dalam hal pemasaran, dimana pemerintah kota dan kabupaten memiliki program reses gudang dan pasar lelang, sehingga hal ini dapat dimanfaatkan petani dalam pemasaran produk dan pemotongan mata rantai tata niaga pertanian, dengan pendeknya mata rantai perdagangan akan meningkatkan nilai jual padi.

⁸ Anonim, 2010 dalam, Muliaman D Haddad, Hadad, Muliaman D, *Peran Sektor Jasa Keuangan dalam Pembiayaan Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan*. Seminar Jakarta Food Security Summit 3. Jakarta, 13 Februari 2015.

Hal ini juga sesuai dengan konsep pengembangan ekonomi lokal (PEL), dimana salah satu syarat dalam PEL adalah kerjasama antara pihak swasta berbasis kelompok (kelompok petani) dan pemerintah. Apabila antara pihak swasta dan pemerintah sudah terjalin baik secara formal maupun secara emosional, tidak menutup kemungkinan program-program pemerintah akan dapat mengakomodir permasalahan yang dihadapi oleh pihak swasta (kelompok pepetani). Termasuk permasalahan nilai jual padi yang rendah.

Ketiga, wadah pembinaan dan pengembangan petani. Dengan pembinaan dan pelatihan penanaman padi, maka metode tanam padi dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Saat ini petani padi masih menggunakan metode tanam tradisional dimana masih minim sentuhan teknologi pertanian dan inovasi, dengan pembinaan dan pengembangan melalui pelatihan dan penyuluhan dari lembaga petani, maka dengan adanya pelatihan metode tanam, dapat mengatasi permasalahan-permasalahan petani pada saat proses tanam, seperti pemilihan bibit yang unggul, penanganan hama, penggunaan alat produksi pertanian, mengatasi saat air yang ada disawah melebihi kapasitas yang diperlukan atau bahkan bagaimana mengatasi permasalahan minimnya air persawahan. Hal ini diharapkan jika petani mampu menggunakan metode tanam yang efisien, maka biaya produksi akan semakin murah, sehingga akan mampu mendongkrak nilai jual padi.

Keempat, akses tenaga ahli. Dari sisi keterampilan bercocok tanam, maka kompetensi yang dimiliki petani tidak diragukan lagi, mengingat mereka sudah puluhan tahun jadi petani sehingga “kenyang” dengan pengalaman bercocok tanam. Namun yang perlu disadari adalah permasalahan yang dihadapi oleh petani mulai dari awal musim tanam sampai masa panen bersifat dinamis, sehingga diperlukan konsultan tenaga ahli untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Tentu petani secara individu akan kesulitan untuk mendatangkan atau konsultasi dengan tenaga ahli, bisa jadi karena masalah biaya, sehingga peran lembaga petani diperlukan untuk mengakomodir bertemunya antara petani dengan tenaga ahli.

Sehingga akan dapat diadakan semacam *Forum Group Discussion* (FGD), antara petani dengan tenaga ahli, dengan adanya FGD akan berpengaruh terhadap pengetahuan dan keterampilan petani. Pengetahuan terkait dengan pertanian secara umum dan keterampilan terkait dengan metode tanam padi yang dapat menghasilkan padi yang bermutu. Tenaga ahli bisa dari konsultan pertanian, penyuluh pertanian atau dinas pertanian setempat. Pada akhirnya petani mampu meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam bertani sampai pada peningkatan harga jual padi, karena padi yang dihasilkan adalah padi yang bermutu dan berkualitas tinggi.

Kelima, penyedia informasi. Ketidaktahuan petani akan program dan bantuan dari pemerintah, akses modal ke lembaga keuangan serta kebutuhan pasar disebabkan oleh kurangnya informasi yang didapat oleh petani, mengingat mereka para petani sehari-hari berada di sawah dan rata-rata berpendidikan rendah, sehingga informasi dari luar tidak didapatkan. Dengan penguatan lembaga petani, maka salah satu tugas dari lembaga petani adalah mencari informasi dari luar, terkait dengan program dan bantuan pemerintah, informasi permodalan yang ditawarkan oleh LKM sampai pada informasi terkait dengan kebutuhan pasar, dan disampaikan kepada anggota lembaga petani.

Dengan begitu petani akan tahu informasi terkait dengan pertanian khususnya informasi tentang harga jual padi yang sesungguhnya, sehingga tidak akan dipermainkan oleh harga tengkulak yang terkadang “bermain” dengan harga padi. Selain itu jika petani mengetahui betul apa saja program dan bantuan pemerintah, maka petani dapat menuntut haknya jika memang terjadi penyelewengan bantuan oleh oknum terkait, dengan begitu istilah bantuan pemerintah salah sasaran tidak akan terjadi, karena petani mengetahui dan berani untuk mengambil sikap. Informasi yang utuh adalah kunci keberhasilan dalam bertani.

Keenam, Jasa Pengelolaan dan Pemasaran. Tahap akhir dari proses pertanian adalah pengelolaan dan pemasaran, dimana ini adalah tahap yang menentukan seberapa besar produk pertanian akan memberikan keuntungan kepada petani atau nilai tambah produk pertanian dan yang sering diformulasikan dalam indikator Nilai Tambah Pertanian (NTP). Pengelolaan yang baik tentu akan memberikan nilai tambah pertanian yang tinggi, selanjutnya pemasaran yang berjalan lancar serta tidak banyak mata rantai perdagangan akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi petani, sehingga peran lembaga petani dalam membantu pengelolaan dan pemasaran padi sangat sentral dalam meningkatkan NTP, sehingga lembaga petani akan mampu menjadi *prime mover* nilai tambah petani.

Padi tidak hanya dapat dipasarkan dalam bentuk padi basah atau kering, namun dapat diolah dulu sehingga memberikan nilai tambah petani, misalnya padi diproses hingga menjadi beras yang memiliki brand, atau mungkin padi diproses menjadi bibit unggul, tentu harga padi yang belum melalui proses pengolahan akan lebih rendah dibanding dengan padi yang sudah melalui tahap pengolahan. Sehingga petani tidak tergantung dengan tengkulak atau pedagang besar⁹, karena menurut penelitian, tengkulak dan pedagang besarlah yang menerima keuntungan besar dari produk pertanian. Sehingga jika lembaga petani dapat

⁹ *Ibid*,
274

membantu pengolahan padi, akan menjadikan produk pertanian benar-benar menguntungkan bagi petani, karena dengan pengolahan akan ada nilai tambah untuk produk pertanian dan nilai jual akan meningkat.

Aspek yang tidak kalah penting adalah pemasaran, seperti yang dikemukakan di awal bahwa salah satu penyebab dari rendahnya nilai jual padi adalah karena posisi tawar petani yang rendah petani padi berada pada pasar monopsoni. Disinilah peran lembaga petani dibutuhkan untuk membantu menaikkan posisi tawar petani padi, posisi tawar sangat menentukan seberapa besar nilai produk pertanian yang akan didapat oleh petani, semakin tinggi posisi tawar maka akan semakin besar nilai produk pertanian yang akan didapat oleh petani dan sebaliknya.

Model yang dapat dijadikan alternatif dalam menaikkan posisi tawar petani adalah dengan bekerja sama dengan perusahaan kecil atau perusahaan besar, dan hal ini sangat sulit dilakukan oleh individu petani, apalagi jika kepemilikan lahan kurang dari satu hektar, dan dengan bantuan dari lembaga petani maka proses kerja sama dengan perusahaan kecil atau besar akan semakin mudah. Jika kerjasama sudah terjalin dan kontrak antara perusahaan dengan petani sudah jelas dan saling menguntungkan, maka posisi tawar petani dalam hal pemasaran produk pertanian akan semakin baik, keuntungan yang didapat juga akan meningkat.

Hal ini mengingat bahwa peran industri sebagai sektor pengolahan hasil pertanian akan dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian (padi), begitu juga dengan pertanian sebagai penyuplai bahan baku sektor industri, sehingga hubungan keduanya harus selalu dibangun dan lembaga petani sebagai medianya. Hubungan antara sektor pertanian dan industri akan dapat menjadi *prime mover* dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian, termasuk padi.

Dari pemaparan model-model penguatan lembaga petani di atas, bukanlah suatu hal yang mutlak dan kaku, model-model tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi pertanian setempat. Namun yang jelas setidaknya-tidaknya sebuah lembaga petani harus mampu memenuhi keenam kriteria lembaga petani di atas, sehingga lembaga petani benar-benar menjadi *prime mover* dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Dengan begitu lembaga petani tidak hanya dibentuk atas tuntunan program atau untuk menghabiskan anggaran semata, namun benar-benar dapat menyelesaikan atau meminimalisir permasalahan pertanian pada umumnya dan masalah petani padi pada khususnya.

C. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas tentang model penguatan lembaga petani sebagai *prime mover* nilai tambah produk pertanian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pemberdayaan masyarakat pada umumnya dapat dilakukan oleh siapapun, baik oleh individu, kelompok, instansi pemerintah maupun lembaga swasta. Pemberdayaan juga dapat dilakukan dengan berbagai macam instrumen, namun yang harus diperhatikan adalah pemberdayaan harus difokuskan pada suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang bersangkutan dan tidak meninggalkan *local wisdom*. Sehingga instrumen yang digunakan dapat diterima oleh masyarakat dan pada akhirnya tujuan pemberdayaan dapat dicapai.

Kedua, permasalahan utama yang dihadapi oleh petani adalah posisi tawar yang rendah dalam pemasaran hasil produksi pertanian. Hal serupa juga dialami oleh petani padi dimana permasalahan nilai jual padi yang rendah adalah permasalahan yang sampai hari ini belum menemukan titik terang, yang pada akhirnya berdampak pada nilai tukar petani (NTP) yang fluktuatif dan cenderung stagnan berkisar ditingkat 100 poin. Dampak yang ditimbulkan adalah pembangunan sektor pertanian tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ketiga, kelembagaan pertanian sudah ada puluhan tahun yang lalu, sebagai upaya untuk pemberdayaan petani. Namun keberadaan lembaga-lembaga tersebut belum mampu meningkatkan NTP, hal ini disebabkan kelembagaan pertanian lebih banyak digunakan untuk menjalankan program, namun sering mengalami kekeliruan dan ketidaktepatan. Contoh kecil adalah penyaluran alat-alat produksi pertanian dan pupuk bersubsidi yang sering disalah gunakan oleh oknum.

Keempat, pemberdayaan petani padi dapat dilakukan melalui penguatan lembaga petani, dimana penguatan lembaga petani akan mampu menjadi *prime mover* nilai tambah produk pertanian, dengan kriteria sebagai berikut: (1) Lembaga petani harus mampu mengakses produk-produk lembaga keuangan untuk mendapatkan modal dengan angunan yang ringan. (2) Sinergitas dengan program daerah setempat. Dengan bersinergi serta menyesuaikan program dari daerah, maka akan lebih mudah bagi petani untuk mendapatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan, dan lembaga petani sebagai mediatornya. (3) Wadah pembinaan dan pengembangan petani. (4) Akses tenaga ahli. Peran tenaga ahli akan sangat membantu petani dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. (5) Penyedia informasi. Ketidaktahuan petani akan program dan bantuan dari

pemerintah, akses modal ke lembaga keuangan serta kebutuhan pasar disebabkan oleh kurangnya informasi yang mereka terima. (6) Jasa Pengelolaan dan Pemasaran. Tahap akhir dari proses pertanian adalah pengelolaan dan pemasaran, jika lembaga petani mampu membantu petani dalam hal pengelolaan dan pemasaran, maka akan dapat meningkatkan nilai tambah petani. Jika keenam kriteria lembaga petani di atas dapat terpenuhi, maka lembaga petani dapat menjadi *prime mover* nilai tambah produk pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, Sandy dan Tjokropandojo, Dewi Sawitri. *Peran Kelembagaan Petani Dalam Mendukung Keberlanjutan Pertanian Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Lokal*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK V2N1
- Hadad, Muliaman D, *Peran Sektor Jasa Keuangan dalam Pembiayaan Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan*. Seminar Jakarta Food Security Summit 3. Jakarta, 13 Februari 2015.
http://www.ojk.go.id/Files/201502/MDHPembiayaanSektorPeternakanPertaniandanPerikananCetak_1423815844.pdf.
- Hutomo, Mardi Yatmo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, Naskah No. 20, Juni-Juli 2000.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Indonesia 2005*, Jakarta, 2005.
- Kuncoro, Mudrajat. *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan, Edisi Keempat*, Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan (UPP) STIM YKPN, 2006.
- Parma, Putu Gede. *Pengembangan Model Penguatan Lembaga Pertanian Sebagai Prime Mover Pembangunan Kawasan Daerah Penyangga Pembangunan (DPP) Destinasi Wisata Kintamani – Bali*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 3, No. 1, April 2014.
- Warsana, *Pemantapan Kelembagaan Pada Gapoktan*,
<http://www.litbang.pertanian.go.id/artikel/one/249/pdf/Pemantapan%20Kelembagaan%20Pada%20Gapoktan.pdf>. diakses tgl 20 Agustus 2016.
- Wahyuni, Sri. *Kinerja kelompok Petani Dalam Sistem Usaha Petani Padi dan Metode Pemberdayaannya*. Jurnal Litbang Pertanian, 22(1). Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2003.
- Yunita, dkk. *Meningkatkan Penguatan Kelembagaan dan Permodalan Petani Lahan Lebak Sumatera Selatan*. Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal 2014, Palembang 26-27 September 2014.